



**MADRASAH ALIYAH NEGERI
LIMA PULUH KOTA**



**LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN
2023**

**Jl. Raya Padang Japang
Jorong Padang Japang Nagari Tujuh Koto Talago
Kecamatan Guguak Kab. Lima Puluh Kota
26253**



manlimapuluhkota.sch.id



[@manlimapuluhkota](https://www.instagram.com/manlimapuluhkota)



MAN LIMA PULUH KOTA

KATA PENGANTAR



Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat (418085) adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan **Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat (418085)** mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggung jawaban dan transparansi pengelolaan keuangan Negara pada **Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat (418085)**. Disamping itu, Laporan Keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan antara kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dangung-Dangung, 31 Desember 2023
Kepala MAN Lima Puluh Kota


Intan Marajo, S.Pd

NIP. 196905121995031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
MADRASAH ALIYAH NEGERI LIMA PULUH KOTA

Jl. Padang Japang Kenagarian Tujuh Koto Talago Kec. Guguak Telp. (0752) 97081
Website : manlimapuluhkota.sch.id Email : manlimapuluhkota@gmail.com
Dangung – Dangung : 26253

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan MAN Lima Puluh Kota Kabupaten Lima Puluh Kota (04) yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dangung-Dangung, 31 Desember 2023
Kepala MAN Lima Puluh Kota



Intan Marajo, S.Pd
NIP. 196905121995031002

Laporan Keuangan MAN Lima Puluh Kota Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.0.- atau mencapai 0 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp.0.-.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2023 adalah sebesar Rp. 541.867.258,- atau mencapai 99.26 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 545,909,000,-.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023 .

Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp.1.770.917.631,- yang terdiri dari : Aset Tetap (neto) sebesar Rp.1.762.917.631,- dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp.8.000.000.-

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 1.770.917.631,-

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar (Rp.0), sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp 625.848.372,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp.(625.848.372). Surplus Kegiatan Non Operasional dan deficit Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp.0,- dan sebesar Rp.(0) sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp. 625.848.372)

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal Januari 2023 adalah sebesar Rp.1.854.898.745,- dikurangi Defisit-LO sebesar (Rp.625.848.372) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp.0- dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp.541.867.258,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp 1.770.917.631.-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas Laporan Keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN) LIMA PULUH KOTA
KAB. LIMA PULUH KOTA PROV. SUMATERA BARAT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA. 2023		% thd Angg	TA. 2022
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	-	0,00	-
JUMLAH PENDAPATAN		-	-	0,00	-
BELANJA	B.2.				
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.3	-	-	0,00	3.055.759.361
Belanja Barang	B.4	464.909.000	460.878.258	99,00	670.493.337
Belanja Modal	B.5	81.000.000	80.989.000	100,00	47.500.000
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-		-
JUMLAH BELANJA		545.909.000	541.867.258	58,00	3.773.752.698

Catatan atas laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

II. NERACA

MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN) LIMA PULUH KOTA KAB. LIMA PULUH KOTA PROV. SUMATERA BARAT NERACA

PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Pendek	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	-	-
Jumlah Aset Lancar		-	-
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	-	-
Peralatan dan Mesin	C.15	645.553.392	599.553.392
Gedung dan Bangunan	C.16	2.282.612.000	2.282.612.000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.18	239.616.245	204.627.245
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(1.322.378.949)	(1.239.893.892)
Jumlah Aset Tetap		1.762.917.631	1.846.898.745
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.21	-	-
Aset Lain-Lain	C.22	9.278.000	9.278.000
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	(1.278.000)	(1.278.000)
Jumlah Aset Lainnya		8.000.000	8.000.000
JUMLAH ASET		1.770.917.631	1.854.898.745
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	-	-
Hutang yang belum ditagihkan	C.26	-	-
Beban Yang Masih Harus Dibayar	C.27	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		-	-
EKUITAS			
Ekuitas	C.28	1.770.917.631	1.854.898.745
JUMLAH EKUITAS		1.770.917.631	1.854.898.745
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		1.770.917.631	1.854.898.745

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

III. LAPORAN OPERASIONAL

**MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN) LIMA PULUH KOTA
KAB. LIMA PULUH KOTA PROV. SUMATERA BARAT
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Dalam Rupiah)

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

URAIAN	CATATAN	2023	2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	-	-
JUMLAH PENDAPATAN		-	-
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	-	2.337.766.024
Beban Persediaan	D.3	32.749.000	41.296.000
Beban Barang Dan Jasa	D.4	300.436.158	510.114.837
Beban Pemeliharaan	D.5	88.625.000	106.522.500
Beban Perjalanan Dinas	D.6	39.068.100	12.560.000
Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	164.970.114	158.449.280
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		625.848.372	3.166.708.641
SURPLUS (DEFISIT) KEG. OPERASIONAL		(625.848.372)	(3.166.708.641)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus Penjualan Aset Non Lancar	D.11	-	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-	128
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(625.848.372)	(3.166.708.513)
POS LUAR BIASA			
Pendapatan PNB	D.12	-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(625.848.372)	(3.166.708.513)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN) LIMA PULUH KOTA
KAB. LIMA PULUH KOTA PROV. SUMATERA BARAT
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Dalam Rupiah)

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

URAIAN	CATATAN	2023	2022
EKUITAS AWAL	E.1	1.854.898.745	1.965.848.025
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(625.848.372)	(3.166.708.513)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1		
PENYESUAIAN NILAI PERSEDIAAN	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	-
		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	541.867.258	3.055.759.233
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5	(83.981.114)	(110.949.280)
EKUITAS AKHIR	E.6	1.770.917.631	1.854.898.745

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis MAN Lima Puluh Kota Kabupaten Lima Kota

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

MAN Lima Puluh Kota Kabupaten Lima Puluh Kota didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan PMK2005/BALAP.007/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Entitas berkedudukan di Jalan Budi Utomo No 6 Jakarta.

MAN Lima Puluh Kota Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan diatas MAN Lima Puluh Kota Kabupaten Lima Puluh Kota berkomitmen dengan visi "***mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel dan transparan melalui akuntansi pemerintah menuju Laporan Keuangan Kementerian/Negara yang berkualitas.***" Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut :

- Menyelenggarakan yang berkelanjutan berkaitan implementasi akuntansi pemerintah kepada Kementerian Negara/Lembaga.
- Membina secara efektif Kementerian Negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang diimplementasikan.
- Mengembangkan sistem yang profesional dan terpercaya.
- Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal kepada para pemangku kepentingan.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kementerian Agama Kabupaten Lima Puluh Kota . Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran

sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Kementerian Agama Kabupaten Lima Puluh Kota menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kementerian Agama Kabupaten Lima Puluh Kota dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensikonvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Agama Kabupaten Lima Puluh Kota. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan MAN Lima Puluh Kota Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut :

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut :
 - Pendapatan jasa pelatihan diakui setelah pelatihan selesai

dilakukan.

- Pendapatan sewa gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- Pendapatan denda diakui pada saat di keluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi jangka pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi criteria sebagai berikut :
 - a) Piutang yang timbul dari tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang telah didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan atau telah dikeluarkan surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan di dukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlah yang bias di ukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca padanilai yang didapat direalisasikan (*net realizable value*).hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang taktertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihan adalah sebagai berikut :

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR atau Bagian Lancar TPA.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena arus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke aset lain-lain padapos asset lainnya.
- Aset tetap secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat penetapan dari entitas sesuai

dengan ketentuan perundangan-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

d. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang Jangka
Panjang*

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka 12 bulan setelah

tanggalpelaporan.

- Tuntutan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempodari (12) dua belas bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan) dan Kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi Aset Tak Berwujud dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara asset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut disajikan dalam laporan Perubahan Ekuitas

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan MAN Lima Puluh Kota Kabupaten Lima Puluh Kota telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan-kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Uraian	2023	
	ANGGARAN AWAL	REALISASI s.d DESEMBER
Pendapatan		
Pendapatan jasa	0	0
Pendapatan lainnya	0	0
Jumlah Pendapatan	0	0
Belanja		
Belanja Pegawai	0	0
Belanja barang	464.909.000	460.848.258
Belanja Bansos		
Belanja Modal	81.000.000	80.989.000
Jumlah Belanja	545.909.000	541.837.258

Realisasi

Pendapatan Rp.0,-

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.0,- atau mencapai 0persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan

sebesar Rp.0. Pendapatan MAN Lima Puluh Kota Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari Pendapatan dan Jasa Pendapatan Lain-lain. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

(dalam rupiah)

Uraian	2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Jasa	-	-	-
Pendapatan Lain-lain	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Realisasi Pendapatan Jasa Tahun 2023 sama dengan sebesar 0% persen dibandingkan TA 2022. Hal ini disebabkan oleh pengembalian belanja pegawai MAN Lima Puluh Kota Kabupaten Lima Puluh Kota. Selain itu, Pendapatan Lain-lain MAN Lima Puluh Kota Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami kenaikan sebesar 0% yang berasal antara lain dari pendapatan pengembalian belanja pegawai yang berasal dari tahun anggaran yang lalu.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	-	-	0,00
Pendapatan Lain-lain	-	-	0,00
Jumlah	-	-	0,00

Realisasi Belanja Negara

B.2. Belanja

Realisasi Belanja instansi pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp.541.867.258,- atau 99.26% dari anggaran belanja sebesar Rp. 545.909.000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja TA 2023

(dalam rupiah)

URAIAN	2023		
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
Belanja pegawai	0	0	0,00
Belanja Barang	464.909.000	460.878.258	99,13
Belanja Bantuan sosial			0,00
Belanja Modal	81.000.000	80.989.000	99,99
Total Belanja Kotor			0,00
Pengembalian Belanja			
Jumlah	545.909.000	541.867.258	99,26

Belanja Pegawai
Rp.,-

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp. 3.055.759.361,-. belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat Negara, pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang diperkerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 100 persen dari tahun 2022. Hal ini disebabkan antara lain oleh pindahnya pagu belanja pegawai ke bagian SEKJEN

Belanja Barang
Rp.,-

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.460.878.258,- dan Rp. 670.493.337,- dari Realisasi Belanja Barang TA 2022. Hal ini antara lain disebabkan oleh turunnya belanja barang operasional yang cukup signifikan.

Perbandingan Belanja Barang Tahun 2023 dan 2022

URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	0	1.689.899.715	(100,00)
Belanja Barang	460.878.258	670.493.337	(31,26)
Belanja Bantuan Sosial	0	0	-
Belanja Modal	80.989.000	47.500.000	70,50
Jumlah	541.867.258	2.407.893.052	(77,50)

Belanja Modal Rp.,-

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 80.989.000,- dan Rp. 47.500.000,-. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dana Aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 70.5 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2022.

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Belanja Modal
Tanah Rp.0,-

Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Realisasi Belanja Modal TA 2023 mengalami kenaikan/penurunan sebesar persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal tanah TA 2022.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BELANJA	REAL. THN 2023	REAL. THN 2022	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah			0,00
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah			0,00
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah			0,00
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah			0,00
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah			0,00
Jumlah Belanja Kotor			0,00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	0,00

Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin Rp.,-

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp 46.000.000,- dan Rp. 37.500.000,- mengalami kenaikan sebesar 22.36 persen bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2022.

Hal ini disebabkan oleh Bertambahnya Anggaran

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
TA 2023 dan 2022*

(dalam rupiah)

URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022
Laptop	0	12.500.000
Dekstop	0	7.000.000
LCD/Projektor	12.500.000	18.000.000
Printer	0	0
Scanner Document	12.500.000	0
Rak Buku Perpustakaan	18.500.000	0
Jumlah Belanja	43.500.000	37.500.000

Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan Rp.0,-

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Realisasi Belanja Modal tahun 2023 mengalami kenaikan /penurunan sebesar 0 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal Tahun 2022.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

URAIAN JENIS BELANJA	TAHUN 2023	TAHUN 2022	NAIK (TURUN) %
Gedung Tempat Kerja	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	0,00

Belanja Modal
Jalan, dan
Jaringan Rp.0,-

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Realisasi Belanja Modal TA. 2022

mengalami kenaikan/penurunan sebesar 0 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2022.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, irigasi dan Jaringan
Tahun 2023 dan 2022*

(dalam rupiah)

URAIAN JENIS BELANJA	2023	2022	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jaringan			0,00
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan			0,00
Jumlah Belanja Kotor			0,00
Pengembalian Belanja Modal			0,00
Jumlah Belanja			0,00

*Belanja Modal
Lainnya RP.0*

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Realisasi Belanja Modal TA. 2023 mengalami kenaikan/penurunan sebesar 0 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2022.

B.6 Belanja Bantuan Sosial

*Belanja Bantuan
Sosial Rp.0*

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2023 mengalami kenaikan/penurunan sebesar 0% dibandingkan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2022. Belanja Bantuan Sosial yang disalurkan adalah dalam bentuk barang. Bantuan ini diberikan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial yaitu rendahnya tingkat pendidikan yang disebabkan karena banyaknya daerah miskin.

*Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial
tahun 2023 dan 2022*

(dalam rupiah)

URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	NAIK (TURUN)%
Jumlah Belanja Kotor			
Pengembalian			

Aset Lancar Rp. 0,-

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Aset Lancar

Jumlah Aset Lancar MAN Lima Puluh Kota Kabupaten Lima Puluh Kota per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp. 0,- Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau memiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak pelaporan.

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp.0-

C.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut :

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
(dalam rupiah)*

Keterangan	2023	2022
Bank Rakyat Indonesia	-	-
Uang Tunai	-	-
Jumlah	-	-

Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp.0

C.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar masing-masing Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

(dalam rupiah)

Keterangan	2023	2022
Bank BERSAMA No.acc	-	-
Uang Tunai	-	-
Jumlah	-	-

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp.0

C.1.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

(dalam rupiah)

Jenis	2023	2022
Jasa Giro yang belum disetor ke kas negara	-	0
Pajak PPh yang belum disetor	-	0
Honor kegiatan yang belum dibagikan	-	0
Pengembalian belanja belum disetor ke kas negara	-	0
Jumlah	-	-

Piutang PNBPNP Rp.0

C.1.4. Piutang PNBPNP

Saldo Piutang PNBPNP per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Piutang PNBPNP merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNBPNP disajikan sebagai berikut :

Rincian Piutang PNBPNP

(dalam rupiah)

Uraian	2023	2022
Piutang PNBPNP	-	-
Piutang Lainnya	-	-
Jumlah	-	-

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Rp.0

C.1.5. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2023 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporannya yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut :

Rincian Bagian Lancar TP/TGR

(dalam rupiah)

No	Nama	2023	2022
1		-	-
2		-	-
3		-	-
4		-	-
5		-	-
6		-	-
Jumlah		-	-

Bagian Lancar TPA
Rp.0

C.1.6. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Bagian Lancar TPA merupakan TPA yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Bagian Lancar TPA

(dalam rupiah)

No	Nama	2023	2022
1		-	-
2		-	-
3		-	-
4		-	-
5		-	-
Jumlah		-	-

Penyisihan Piutang
Tak Tertagih –
Piutang Lancar
Rp (0)

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp (0) dan Rp (0).

Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - lancar

(dalam rupiah)

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	-	-
Kurang Lancar	-	-	-
Diragukan	-	-	-
Macet	-	-	-
Jumlah	-	-	-
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	-	-
Kurang Lancar	-	-	-
Diragukan	-	-	-
Macet	-	-	-
Jumlah	-	-	-
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	-	-
Kurang Lancar	-	-	-
Diragukan	-	-	-
Macet	-	-	-
Jumlah	-	-	-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-	-	-

Beban Dibayar di Muka Rp.0

C.8 Beban Dibayar di Muka

Saldo Beban Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Beban Dibayar di Muka adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Dibayar di Muka

(dalam rupiah)

Jenis	2023	2022
Pembayaran Internet	-	-
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	-	-
Pembayaran Sewa Gedung Kantor	-	-
Jumlah	-	-

Pendapatan Yang Masih harus Diterima Rp.0

C.9 Pendapatan Yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang masih harus diterima per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Pendapatan yang masih harus diterima adalah hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Pendapatan Yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut :

Perbandingan Rincian Pendapatan yang masih harus diterima

TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Jenis	2023	2022
Pendapatan jasa pelatihan		
Pendapatan jasa pelayanan pendidikan		
Jumlah	0	0

Persediaan Rp.0,-

C.1.10. Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Persediaan

(dalam rupiah)

Persediaan	2023	2022
Barang Konsumsi	-	-
Barang untuk Pemeliharaan		
Suku Cadang		
Persediaan Lainnya		
Jumlah	-	-

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Terdapat barang konsumsi senilai Rp.0,- berada dalam kondisi rusak dan tidak disajikan dalam Persediaan.

Aset Tetap Rp.,-

C.2. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap MAN Lima Puluh Kota Kabupaten Lima Puluh Kota per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.1.770.917.631,- dan Rp. 1.846.898.745,-. Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset Tetap pada MAN Lima Puluh Kota adalah Gedung dan Bangunan, jalan, Irigasi, Jaringan dan Aset Tetap Lainnya.

Tanah
Rp.0.-

C.2.1. Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki MAN Lima Puluh Kota Kabupaten Lima Puluh Kota per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0.-. Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 30 September 2022	0
Mutasi tambah:	0
Hibah	0
Mutasi kurang:	0
Penyitaan pengadilan	0
Saldo per 31 Desember 2023	0
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2022	0
Nilai Buku Per 31 Desember 2023	0

Peralatan dan
Mesin
Rp.,-

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp. 645.553.392,- dan Rp.599.553.392.-

Gedung dan
Bangunan
Rp ,-

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp. 2.282.612.000,- dan Rp. 2.282.612.000,-. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan TA. 2023
(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	2.282.612.000
Mutasi tambah:	
Pembangunan tambahan ruang kelas	
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2023	2.282.612.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	-
Nilai Buku per 31 Desember 2023	2.282.612.000

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Jalan, Irigasi dan
Jaringan Rp0

C.2.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp,0 dan Rp.0-. Pada tahun terjadi mutasi tambah sebesar Rp,0.- yang merupakan penambahan jaringan teknologi informasi. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	-
Mutasi tambah:	
Penambahan jaringan teknologi informasi	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2023	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	-
Nilai Buku per 31 Desember 2023	-

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap Lainnya

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp.239.616.245 dan Rp.204.627.245. Aset tetap tersebut berupa barang bercorak kesenian. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk Tahun 2023.

Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	204.627.245
Mutasi tambah:	
Penambahan jaringan teknologi informasi	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2023	239.616.245
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	-
Nilai Buku per 31 Desember 2023	239.616.245

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp 0

C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2023 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp,0- dan Rp,0-.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing Rp.(1.404.864.006,-) dan Rp.(1.239.893.892). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang

disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Piutang Jangka Panjang Rp.0,-

C.3. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang MAN Lima Puluh Kota Kabupaten Lima Puluh Kota per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TAPI/TGR) Rp.0,-

C.3.1. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Tagihan TP/TGR

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023	2022
1		-	-
2		-	-
Jumlah		-	-

Tagihan Penjualan Angsuran Rp.0,-

C.3.2. Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp,0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Tagihan PA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut :

Rincian Tagihan TP/TGR

(dalam rupiah)

No	Debitur	2023	2022
1		-	-
2		-	-
3		-	-

Penyisihan Piutang
Tak tertagih-
Piutang Jangka
Panjang Rp.0,-

C.3.3. Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp(0) dan Rp(0). Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutangTPA.

Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut :

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Jangka Panjang

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	-	-
Kurang Lancar	-	-	-
Diragukan	-	-	-
Macet	-	-	-
Jumlah	-	-	-
Tagihan PA			
Lancar	-	-	-
Kurang Lancar	-	-	-
Diragukan	-	-	-
Macet	-	-	-
Jumlah	-	-	-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-	-	-

Aset Lainnya Rp.
0,-

C.4. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya MAN Lima Puluh Kota Kabupaten Lima Puluh Kota per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.8.000.000,- dan Rp. 8.000.000,-

Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Aset Lainnya pada MAN Lima Puluh Kota Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari Aset Tak Berwujud dan Aset lainnya

C.4.1. Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp.0,-.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.

Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya

C.4.2. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing Rp.(1.278.000) dan Rp.(1.278.000). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

(dalam rupiah)

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud	0	0	0
Aset Lain-lain	1.278.000	1.278.000	0
Jumlah	1.278.000	1.278.000	0

Kewajiban Jangka
Pendek Rp. 0,-

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban Utang Pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban Jangka Pendek MAN Lima Puluh Kota Kabupaten Lima Puluh Kota per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp.0,-

Uang Muka dari
KPPN Rp.0,-

C.5.1. Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 . Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kejadian masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang Kepada
Pihak Ketiga Rp.0,-

C.5.2. Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Kantor Kementerian agama Kabupaten Lima Puluh kota Eselon II (01) per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar		
Belanja barang yang masih harus dibayar		
Utang kepada Pihak ketiga lainnya		
Total	-	

Pendapatan yang
ditangguhkan
Rp0

C.5.3. Pendapatan Ditangguhkan

Nilai Pendapatan yang ditangguhkan per 31 Desember 2022 dan 2020 sebesar Rp.0 dan Rp.0. Pendapatan yang ditangguhkan merupakan pendapatan Negara yang belum disetorkan ke kas Negara pada tanggal pelaporan. Pendapatan tersebut merupakan pendapatan PNBPN, pengembalian belanja, serta pungutan/potong pajak yang belum disetor ke kas Negara pada tanggal 31 Desember 2022. Rincian Pendapatan yang ditangguhkan pada Kementerian agama Kabupaten Lima Puluh kota Eselon II (01) per tanggal pelaporan disajikan sebagai berikut :

Rincian Pendapatan Yang Ditangguhkan

(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah
PNBP	
PPH yang belum disetor	
Total	

Pendapatan
Diterima di Muka
Rp.0,-

C.5.4. Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp.0 dan Rp.0. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun. Rincian Pendapatan Diterima di Muka dari pihak ketiga disajikan sebagai berikut :

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah
Total	

Beban Yang Masih
Harus Dibayar
Rp.0,-

C.5.5. Beban Yang Masih Harus Dibayar

Beban yang masih harus dibayar per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp.0 dan Rp.0 merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut :

Perbandingan Rincian Beban yang masih harus dibayar
TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Belanja pegawai yang masih harus dibayar		
Belanja barang yang masih harus dibayar		
Belanja modal yang masih harus dibayar		
Jumlah		

Ekuitas Rp. -

C. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.1.770.917.631,- dan Rp.1.854.898.745,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang Ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pendapatan PNB
Rp.0,-

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk tahun 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp.0,- dan Rp. 0,-. Pendapatan tersebut terdiri dari :

*Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak tahun 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah)*

URAIAN	Tahun 2022	Tahun 2021	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa			-
Pendapatan Lain-lain	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Pendapatan Jasa merupakan Pendapatan-LO yang diperoleh dari PNB. Sedangkan Pendapatan Lain-Lain-LO merupakan pengembalian belanja pegawai dan belanja lainnya yang berasal dari transaksi tahun 2023.

Beban Pegawai

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp. 2.337.766.024,-. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban Persediaan

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.32.749.000,- dan Rp. 41.296.000,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Beban Barang dan
Jasa

D.4 Beban Barang Dan Jasa

Jumlah Beban barang dan Jasa tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 300.436.158,- dan Rp. 510.114.837,-. Beban barang dan Jasa terdiri dari Beban barang dan Jasa merupakan konsumsi atas barang dan/atau jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Beban
Pemeliharaan ,-

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.88.625.000,- dan Rp. 106.522.500,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Beban Perjalanan Dinas,-

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.39.068.100,- dan Rp. 12.560.000,-. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan.

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Rp.0.

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp. 0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	2023	2022	NAIK (TURUN) %
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0,00
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0,00
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0,00
Jumlah	0	0	0

Beban Bantuan Sosial Rp.0,-

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Bantuan Sosial tahun 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	2023	2022	% NAIK (TURUN)
Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial		-	-
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial		-	-
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial		-	-
Jumlah		-	-

*Beban Penyusutan
dan Amortisasi*

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.164.970.114,- dan Rp. 158.449.280-. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

*Beban Penyisihan
Piutang Tak
TertagihRp.0*

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	2023	2022	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jk Pendek		-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jk Panjang		-	-
Jumlah		-	-

Surplus /Defisit dari
Kegiatan Non
Operasional

D.11 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Kegiatan Non Operasional Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

URAIAN	2023	2022	NAIK (TURUN) %
Surplus Penjualan Aset Non Lancar	0	0	
Penjualan Alat Angkut Darat	0	0	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar	0	0	
Penjualan Alat Kantor	0	0	-
Defisit Selisih Kurs	0	0	0,00
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	0	128	100,00

Pos Luar Biasa Rp,-

D.12 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Pos Luar Biasa tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

URAIAN	2023	2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan PNB	0	0	-
Beban Perjalanan Dinas	0	0	-
Beban Persediaan	0	0	-
Jumlah	0	0	-

C. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal Rp,-

E.1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.1.854.898.745,- dan Rp. 1.965.848.025,-.

Surplus (Defisit) LO

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp. (625.848.372) dan Rp. (3.166.708.513). Defisit LO merupakan

selisih kurang antara surplus/deficit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Dampak Kumulatif
Perubahan Kebijakan
Akuntansi Rp.0,-*

E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi

Transaksi Dampak Kumulatif Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.0,-.

Penyesuaian Nilai Aset

E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai penyesuaian aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyesuaian aset ini merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir

*Koreksi Nilai
Persediaan Rp.0,-*

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp 0 dan Rp 0. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2023 adalah sbb :

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Koreksi
Barang Konsumsi	
Suku Cadang	
Jumlah	

*Selisih revaluasi
aset tetap Rp.0,-*

E.4.3 Selisih revaluasi Aset Tetap

Selisih revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian aset tetap. Selisih revaluasi Aset tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan 0.

*Koreksi aset tetap
non revaluasi
Rp.0,-*

E.4.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset tetap non revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Rincian untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Koreksi Aset tetap non Revaluasi tahun 2023

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Peralatan mesin	
Gedung dan bangunan	
Jumlah	

*Koreksi Lain-lain
Rp.0*

E.4.5 Koreksi lain-lain

Koreksi lain-lain pada periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

*Koreksi antar
Entitas Rp*

E.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar entitas untuk berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 541.867.258,- dan Rp. 3.055.759.233.-. Transaksi antar entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KI, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Ekuitas Akhir

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.1.770.917.631,- dan Rp. 1.854.898.745,-.

D. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN